



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Kamis 14 November 2024



RINGKASAN BERITA HARI INI

Komisi D DPRD Sidoarjo Tampung Usulan Kenaikan UMK

Sidoarjo – HARIAN BANGSA
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo menampung usulan yang disampaikan oleh ratusan massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sidoarjo terkait kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 10 persen.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori di Sidoarjo, Rabu, menyatakan apresiasi terhadap aspirasi setiap elemen masyarakat termasuk para buruh yang menggelar aksi unjuk rasa tersebut. "Kami apresiasi hal tersebut yang mana merupakan hak setiap elemen warga masyarakat," ucap Dhamroni.

Dhamroni menyampaikan ada regulasi yang menjadi dasar penetapan upah minimum di suatu daerah yang mencakup banyak pemangku kepentingan, terutama dari pihak buruh dan perusahaan yang terlibat.

Maka dari itu pihaknya menjelaskan bahwa DPRD Sidoarjo akan mengusulkan kepada pemerintah terkait aspirasi kaum buruh tersebut sebagai bentuk perwakilan masyarakat daerah Sidoarjo khususnya kaum buruh. "Keputusan akhir tetap ada di tangan Gubernur, kami hanya bisa membantu dengan menyampaikan usulan kepada pemerintah," jelas Dhamroni.

Sementara itu massa yang



Massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sidoarjo bergerak menuju Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Rabu (13/11/2024).

turun ke jalan meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memperhatikan kesejahteraan buruh yang menjadi tulang punggung

perekonomian Sidoarjo. "Kami sudah meminta Disnaker Sidoarjo untuk memerintahkan Dewan Pengupahan un-

tuk segera membahas kenaikan upah pekerja Sidoarjo," ujar koordinator aksi Suyatno.

Suyatno menerangkan bahwa tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 10 persen merupakan hal yang wajar menilai pertumbuhan ekonomi Sidoarjo sebesar 6,6 persen banyak disokong oleh industri yang memperkerjakan kaum buruh.

Pihaknya menjelaskan selama empat tahun terakhir kenaikan UMK di Sidoarjo hanya naik 3 persen atau sebesar Rp 40.000 yang dinilai tidak paralel dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi yang menyentuh angka 6,13 persen dari tahun 2023 lalu. **(ant/rus)**

U-Turn Jalan S. Parman Pakai Skema Buka Tutup

SIDOARJO – Setelah melalui tahap uji coba, Satlantas Polresta Sidoarjo memutuskan untuk tidak memermanenkan penutupan jalur putar balik (U-turn) di jalur utama Sidoarjo-Surabaya, tepatnya di Jalan Letjen S. Parman. Sebagai gantinya, jalur putar balik itu diberlakukan sistem buka tutup, di mana penutupan U-turn dilakukan pada jam-jam tertentu untuk meminimalkan kemacetan di ruas jalan tersebut. "Jadi, diterapkan sistem buka tutup untuk U-turn di Jalan Letjen S. Parman, ada jam-jamnya. Pada pagi dan sore hari," kata Kanit-



SITUASIONAL: Papan pembatas terpasang di U-Turn Jalan Letjen S. Parman. Penutupan itu diputuskan tidak permanen.

turjawali Satlantas Polresta Sidoarjo AKP Jauhar. Pada pagi hari, penutupan putar balik itu akan dilakukan pada pukul 06.00 hingga 08.00. Sedangkan pada sore hari, penutupan dilakukan pukul 16.00 hingga 18.00.

"Sama-sama ditutup dua jam saja," katanya. Meski begitu, Jauhar mengatakan bahwa jadwal penutupan tersebut tidak tetap. Petugas patroli bisa menutup U-turn sewaktu-waktu. **(eza/ris)**

Belum Semua Pelaku Usaha Memahami Regulasi Perizinan

SIDOARJO – Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten penyumbang investasi terbesar di Jawa Timur. Meski demikian, masih ada PR terkait kemudahan layanan perizinan bagi para pelaku usaha yang ingin berinvestasi di kabupaten ini. Salah satu yang cukup krusial adalah masalah sosialisasi program kepada para pengusaha. Selain itu, yang juga diperlukan adalah keberadaan petugas khusus yang bisa menjadi pemandu proses perizinan. Hal itu berdasarkan hasil forum konsultasi publik bagi pelaku usaha yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Sidoarjo bersama stakeholder. Forum itu jadi ajang pemetaan terkait kendala pelaku usaha terkait proses perizinan. "Perlu lebih banyak sosialisasi, terutama terkait tata cara pembuatan izin secara online," kata Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Kayan. Menurutnya, saat ini masih ada



keluhan terkait hal ini. Tak sedikit para pengusaha yang kesulitan. Sebab, regulasi perizinan memang kompleks. "Selain itu, perlu *contact person* sendiri agar pemohon izin tidak bingung," katanya. Sebagai solusi, Pemkab perlu menambah akses informasi terkait tata cara pengurusan izin. "Sehingga semakin meminimalkan kurangnya

pemahaman dan informasi tentang perizinan," katanya. Sementara itu, Kepala DPMPSTP Sidoarjo Rudi Setiawan mengatakan pihaknya terus memberikan layanan yang memudahkan. Di antaranya melalui *class meeting* atau grup khusus lewat aplikasi percakapan bersama pelaku usaha. "Secara *offline*, kami juga menyiapkan pelayanan kemudahan berusaha yang berisi 10 perangkat daerah teknis," katanya. Rudi optimistis layanan-layanan ini bakal makin memudahkan para pengusaha. Karena itu pula, DPMPSTP optimistis untuk tahun ini target realisasi investasi Rp 12 triliun bisa tercapai. "Yang kita lakukan, secara *offline* kita menyiapkan SDM pelayanan kemudahan berusaha yang berisi 10 perangkat daerah teknis," katanya. Secara *online*, pihaknya menyiapkan sistemnya dengan mengintegrasikan di aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU). **(uzi/ris)**

KPPBC TMP B Sidoarjo Musnahkan Rokok Ilegal

SIDOARJO – HARIAN BANGSA
Jajap membarantas peredaran rokok ilegal. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo (KPPBC TMP B Sidoarjo) memusnahkan barang bucu ilegal dengan total 5.873.164 batang rokok ilegal dengan total nilai Rp 255.236.920 dimusnahkan melalui proses pembakaran. Aksi ini dilakukan untuk memastikan barang-barang tersebut tidak beredar di pasaran. Dalam penindakan tersebut, menghancurkan asor dari berbagai jenis dan merk peredaran ilegal. 1. Rafiq Septiana / Praktisi ICT 2. Anam Fauzan / Manajer 3. Agus Y. Cahono / Praktisi IAP 4. Dhan Pratomo / Akademisi UMK 5. Widiyanti / Praktisi IAP 6. Satrio / Praktisi IAP 7. Agus / Praktisi IAP 8. Agus / Praktisi IAP 9. Agus / Praktisi IAP 10. Agus / Praktisi IAP 11. Agus / Praktisi IAP 12. Agus / Praktisi IAP 13. Agus / Praktisi IAP 14. Agus / Praktisi IAP 15. Agus / Praktisi IAP 16. Agus / Praktisi IAP 17. Agus / Praktisi IAP 18. Agus / Praktisi IAP 19. Agus / Praktisi IAP 20. Agus / Praktisi IAP 21. Agus / Praktisi IAP 22. Agus / Praktisi IAP 23. Agus / Praktisi IAP 24. Agus / Praktisi IAP 25. Agus / Praktisi IAP 26. Agus / Praktisi IAP 27. Agus / Praktisi IAP 28. Agus / Praktisi IAP 29. Agus / Praktisi IAP 30. Agus / Praktisi IAP 31. Agus / Praktisi IAP 32. Agus / Praktisi IAP 33. Agus / Praktisi IAP 34. Agus / Praktisi IAP 35. Agus / Praktisi IAP 36. Agus / Praktisi IAP 37. Agus / Praktisi IAP 38. Agus / Praktisi IAP 39. Agus / Praktisi IAP 40. Agus / Praktisi IAP 41. Agus / Praktisi IAP 42. Agus / Praktisi IAP 43. Agus / Praktisi IAP 44. Agus / Praktisi IAP 45. Agus / Praktisi IAP 46. Agus / Praktisi IAP 47. Agus / Praktisi IAP 48. Agus / Praktisi IAP 49. Agus / Praktisi IAP 50. Agus / Praktisi IAP 51. Agus / Praktisi IAP 52. Agus / Praktisi IAP 53. Agus / Praktisi IAP 54. Agus / Praktisi IAP 55. Agus / Praktisi IAP 56. Agus / Praktisi IAP 57. Agus / Praktisi IAP 58. Agus / Praktisi IAP 59. Agus / Praktisi IAP 60. Agus / Praktisi IAP 61. Agus / Praktisi IAP 62. Agus / Praktisi IAP 63. Agus / Praktisi IAP 64. Agus / Praktisi IAP 65. Agus / Praktisi IAP 66. Agus / Praktisi IAP 67. Agus / Praktisi IAP 68. Agus / Praktisi IAP 69. Agus / Praktisi IAP 70. Agus / Praktisi IAP 71. Agus / Praktisi IAP 72. Agus / Praktisi IAP 73. Agus / Praktisi IAP 74. Agus / Praktisi IAP 75. Agus / Praktisi IAP 76. Agus / Praktisi IAP 77. Agus / Praktisi IAP 78. Agus / Praktisi IAP 79. Agus / Praktisi IAP 80. Agus / Praktisi IAP 81. Agus / Praktisi IAP 82. Agus / Praktisi IAP 83. Agus / Praktisi IAP 84. Agus / Praktisi IAP 85. Agus / Praktisi IAP 86. Agus / Praktisi IAP 87. Agus / Praktisi IAP 88. Agus / Praktisi IAP 89. Agus / Praktisi IAP 90. Agus / Praktisi IAP 91. Agus / Praktisi IAP 92. Agus / Praktisi IAP 93. Agus / Praktisi IAP 94. Agus / Praktisi IAP 95. Agus / Praktisi IAP 96. Agus / Praktisi IAP 97. Agus / Praktisi IAP 98. Agus / Praktisi IAP 99. Agus / Praktisi IAP 100. Agus / Praktisi IAP 101. Agus / Praktisi IAP 102. Agus / Praktisi IAP 103. Agus / Praktisi IAP 104. Agus / Praktisi IAP 105. Agus / Praktisi IAP 106. Agus / Praktisi IAP 107. Agus / Praktisi IAP 108. Agus / Praktisi IAP 109. Agus / Praktisi IAP 110. Agus / Praktisi IAP 111. Agus / Praktisi IAP 112. Agus / Praktisi IAP 113. Agus / Praktisi IAP 114. Agus / Praktisi IAP 115. Agus / Praktisi IAP 116. Agus / Praktisi IAP 117. Agus / Praktisi IAP 118. Agus / Praktisi IAP 119. Agus / Praktisi IAP 120. Agus / Praktisi IAP 121. Agus / Praktisi IAP 122. Agus / Praktisi IAP 123. Agus / Praktisi IAP 124. Agus / Praktisi IAP 125. Agus / Praktisi IAP 126. Agus / Praktisi IAP 127. Agus / Praktisi IAP 128. Agus / Praktisi IAP 129. Agus / Praktisi IAP 130. Agus / Praktisi IAP 131. Agus / Praktisi IAP 132. Agus / Praktisi IAP 133. Agus / Praktisi IAP 134. Agus / Praktisi IAP 135. Agus / Praktisi IAP 136. Agus / Praktisi IAP 137. Agus / Praktisi IAP 138. Agus / Praktisi IAP 139. Agus / Praktisi IAP 140. Agus / Praktisi IAP 141. Agus / Praktisi IAP 142. Agus / Praktisi IAP 143. Agus / Praktisi IAP 144. Agus / Praktisi IAP 145. Agus / Praktisi IAP 146. Agus / Praktisi IAP 147. Agus / Praktisi IAP 148. Agus / Praktisi IAP 149. Agus / Praktisi IAP 150. Agus / Praktisi IAP 151. Agus / Praktisi IAP 152. Agus / Praktisi IAP 153. Agus / Praktisi IAP 154. Agus / Praktisi IAP 155. Agus / Praktisi IAP 156. Agus / Praktisi IAP 157. Agus / Praktisi IAP 158. Agus / Praktisi IAP 159. Agus / Praktisi IAP 160. Agus / Praktisi IAP 161. Agus / Praktisi IAP 162. Agus / Praktisi IAP 163. Agus / Praktisi IAP 164. Agus / Praktisi IAP 165. Agus / Praktisi IAP 166. Agus / Praktisi IAP 167. Agus / Praktisi IAP 168. Agus / Praktisi IAP 169. Agus / Praktisi IAP 170. Agus / Praktisi IAP 171. Agus / Praktisi IAP 172. Agus / Praktisi IAP 173. Agus / Praktisi IAP 174. Agus / Praktisi IAP 175. Agus / Praktisi IAP 176. Agus / Praktisi IAP 177. Agus / Praktisi IAP 178. Agus / Praktisi IAP 179. Agus / Praktisi IAP 180. Agus / Praktisi IAP 181. Agus / Praktisi IAP 182. Agus / Praktisi IAP 183. Agus / Praktisi IAP 184. Agus / Praktisi IAP 185. Agus / Praktisi IAP 186. Agus / Praktisi IAP 187. Agus / Praktisi IAP 188. Agus / Praktisi IAP 189. Agus / Praktisi IAP 190. Agus / Praktisi IAP 191. Agus / Praktisi IAP 192. Agus / Praktisi IAP 193. Agus / Praktisi IAP 194. Agus / Praktisi IAP 195. Agus / Praktisi IAP 196. Agus / Praktisi IAP 197. Agus / Praktisi IAP 198. Agus / Praktisi IAP 199. Agus / Praktisi IAP 200. Agus / Praktisi IAP 201. Agus / Praktisi IAP 202. Agus / Praktisi IAP 203. Agus / Praktisi IAP 204. Agus / Praktisi IAP 205. Agus / Praktisi IAP 206. Agus / Praktisi IAP 207. Agus / Praktisi IAP 208. Agus / Praktisi IAP 209. Agus / Praktisi IAP 210. Agus / Praktisi IAP 211. Agus / Praktisi IAP 212. Agus / Praktisi IAP 213. Agus / Praktisi IAP 214. Agus / Praktisi IAP 215. Agus / Praktisi IAP 216. Agus / Praktisi IAP 217. Agus / Praktisi IAP 218. Agus / Praktisi IAP 219. Agus / Praktisi IAP 220. Agus / Praktisi IAP 221. Agus / Praktisi IAP 222. Agus / Praktisi IAP 223. Agus / Praktisi IAP 224. Agus / Praktisi IAP 225. Agus / Praktisi IAP 226. Agus / Praktisi IAP 227. Agus / Praktisi IAP 228. Agus / Praktisi IAP 229. Agus / Praktisi IAP 230. Agus / Praktisi IAP 231. Agus / Praktisi IAP 232. Agus / Praktisi IAP 233. Agus / Praktisi IAP 234. Agus / Praktisi IAP 235. Agus / Praktisi IAP 236. Agus / Praktisi IAP 237. Agus / Praktisi IAP 238. Agus / Praktisi IAP 239. Agus / Praktisi IAP 240. Agus / Praktisi IAP 241. Agus / Praktisi IAP 242. Agus / Praktisi IAP 243. Agus / Praktisi IAP 244. Agus / Praktisi IAP 245. Agus / Praktisi IAP 246. Agus / Praktisi IAP 247. Agus / Praktisi IAP 248. Agus / Praktisi IAP 249. Agus / Praktisi IAP 250. Agus / Praktisi IAP 251. Agus / Praktisi IAP 252. Agus / Praktisi IAP 253. Agus / Praktisi IAP 254. Agus / Praktisi IAP 255. Agus / Praktisi IAP 256. Agus / Praktisi IAP 257. Agus / Praktisi IAP 258. Agus / Praktisi IAP 259. Agus / Praktisi IAP 260. Agus / Praktisi IAP 261. Agus / Praktisi IAP 262. Agus / Praktisi IAP 263. Agus / Praktisi IAP 264. Agus / Praktisi IAP 265. Agus / Praktisi IAP 266. Agus / Praktisi IAP 267. Agus / Praktisi IAP 268. Agus / Praktisi IAP 269. Agus / Praktisi IAP 270. Agus / Praktisi IAP 271. Agus / Praktisi IAP 272. Agus / Praktisi IAP 273. Agus / Praktisi IAP 274. Agus / Praktisi IAP 275. Agus / Praktisi IAP 276. Agus / Praktisi IAP 277. Agus / Praktisi IAP 278. Agus / Praktisi IAP 279. Agus / Praktisi IAP 280. Agus / Praktisi IAP 281. Agus / Praktisi IAP 282. Agus / Praktisi IAP 283. Agus / Praktisi IAP 284. Agus / Praktisi IAP 285. Agus / Praktisi IAP 286. Agus / Praktisi IAP 287. Agus / Praktisi IAP 288. Agus / Praktisi IAP 289. Agus / Praktisi IAP 290. Agus / Praktisi IAP 291. Agus / Praktisi IAP 292. Agus / Praktisi IAP 293. Agus / Praktisi IAP 294. Agus / Praktisi IAP 295. Agus / Praktisi IAP 296. Agus / Praktisi IAP 297. Agus / Praktisi IAP 298. Agus / Praktisi IAP 299. Agus / Praktisi IAP 300. Agus / Praktisi IAP 301. Agus / Praktisi IAP 302. Agus / Praktisi IAP 303. Agus / Praktisi IAP 304. Agus / Praktisi IAP 305. Agus / Praktisi IAP 306. Agus / Praktisi IAP 307. Agus / Praktisi IAP 308. Agus / Praktisi IAP 309. Agus / Praktisi IAP 310. Agus / Praktisi IAP 311. Agus / Praktisi IAP 312. Agus / Praktisi IAP 313. Agus / Praktisi IAP 314. Agus / Praktisi IAP 315. Agus / Praktisi IAP 316. Agus / Praktisi IAP 317. Agus / Praktisi IAP 318. Agus / Praktisi IAP 319. Agus / Praktisi IAP 320. Agus / Praktisi IAP 321. Agus / Praktisi IAP 322. Agus / Praktisi IAP 323. Agus / Praktisi IAP 324. Agus / Praktisi IAP 325. Agus / Praktisi IAP 326. Agus / Praktisi IAP 327. Agus / Praktisi IAP 328. Agus / Praktisi IAP 329. Agus / Praktisi IAP 330. Agus / Praktisi IAP 331. Agus / Praktisi IAP 332. Agus / Praktisi IAP 333. Agus / Praktisi IAP 334. Agus / Praktisi IAP 335. Agus / Praktisi IAP 336. Agus / Praktisi IAP 337. Agus / Praktisi IAP 338. Agus / Praktisi IAP 339. Agus / Praktisi IAP 340. Agus / Praktisi IAP 341. Agus / Praktisi IAP 342. Agus / Praktisi IAP 343. Agus / Praktisi IAP 344. Agus / Praktisi IAP 345. Agus / Praktisi IAP 346. Agus / Praktisi IAP 347. Agus / Praktisi IAP 348. Agus / Praktisi IAP 349. Agus / Praktisi IAP 350. Agus / Praktisi IAP 351. Agus / Praktisi IAP 352. Agus / Praktisi IAP 353. Agus / Praktisi IAP 354. Agus / Praktisi IAP 355. Agus / Praktisi IAP 356. Agus / Praktisi IAP 357. Agus / Praktisi IAP 358. Agus / Praktisi IAP 359. Agus / Praktisi IAP 360. Agus / Praktisi IAP 361. Agus / Praktisi IAP 362. Agus / Praktisi IAP 363. Agus / Praktisi IAP 364. Agus / Praktisi IAP 365. Agus / Praktisi IAP 366. Agus / Praktisi IAP 367. Agus / Praktisi IAP 368. Agus / Praktisi IAP 369. Agus / Praktisi IAP 370. Agus / Praktisi IAP 371. Agus / Praktisi IAP 372. Agus / Praktisi IAP 373. Agus / Praktisi IAP 374. Agus / Praktisi IAP 375. Agus / Praktisi IAP 376. Agus / Praktisi IAP 377. Agus / Praktisi IAP 378. Agus / Praktisi IAP 379. Agus / Praktisi IAP 380. Agus / Praktisi IAP 381. Agus / Praktisi IAP 382. Agus / Praktisi IAP 383. Agus / Praktisi IAP 384. Agus / Praktisi IAP 385. Agus / Praktisi IAP 386. Agus / Praktisi IAP 387. Agus / Praktisi IAP 388. Agus / Praktisi IAP 389. Agus / Praktisi IAP 390. Agus / Praktisi IAP 391. Agus / Praktisi IAP 392. Agus / Praktisi IAP 393. Agus / Praktisi IAP 394. Agus / Praktisi IAP 395. Agus / Praktisi IAP 396. Agus / Praktisi IAP 397. Agus / Praktisi IAP 398. Agus / Praktisi IAP 399. Agus / Praktisi IAP 400. Agus / Praktisi IAP 401. Agus / Praktisi IAP 402. Agus / Praktisi IAP 403. Agus / Praktisi IAP 404. Agus / Praktisi IAP 405. Agus / Praktisi IAP 406. Agus / Praktisi IAP 407. Agus / Praktisi IAP 408. Agus / Praktisi IAP 409. Agus / Praktisi IAP 410. Agus / Praktisi IAP 411. Agus / Praktisi IAP 412. Agus / Praktisi IAP 413. Agus / Praktisi IAP 414. Agus / Praktisi IAP 415. Agus / Praktisi IAP 416. Agus / Praktisi IAP 417. Agus / Praktisi IAP 418. Agus / Praktisi IAP 419. Agus / Praktisi IAP 420. Agus / Praktisi IAP 421. Agus / Praktisi IAP 422. Agus / Praktisi IAP 423. Agus / Praktisi IAP 424. Agus / Praktisi IAP 425. Agus / Praktisi IAP 426. Agus / Praktisi IAP 427. Agus / Praktisi IAP 428. Agus / Praktisi IAP 429. Agus / Praktisi IAP 430. Agus / Praktisi IAP 431. Agus / Praktisi IAP 432. Agus / Praktisi IAP 433. Agus / Praktisi IAP 434. Agus / Praktisi IAP 435. Agus / Praktisi IAP 436. Agus / Praktisi IAP 437. Agus / Praktisi IAP 438. Agus / Praktisi IAP 439. Agus / Praktisi IAP 440. Agus / Praktisi IAP 441. Agus / Praktisi IAP 442. Agus / Praktisi IAP 443. Agus / Praktisi IAP 444. Agus / Praktisi IAP 445. Agus / Praktisi IAP 446. Agus / Praktisi IAP 447. Agus / Praktisi IAP 448. Agus / Praktisi IAP 449. Agus / Praktisi IAP 450. Agus / Praktisi IAP 451. Agus / Praktisi IAP 452. Agus / Praktisi IAP 453. Agus / Praktisi IAP 454. Agus / Praktisi IAP 455. Agus / Praktisi IAP 456. Agus / Praktisi IAP 457. Agus / Praktisi IAP 458. Agus / Praktisi IAP 459. Agus / Praktisi IAP 460. Agus / Praktisi IAP 461. Agus / Praktisi IAP 462. Agus / Praktisi IAP 463. Agus / Praktisi IAP 464. Agus / Praktisi IAP 465. Agus / Praktisi IAP 466. Agus / Praktisi IAP 467. Agus / Praktisi IAP 468. Agus / Praktisi IAP 469. Agus / Praktisi IAP 470. Agus / Praktisi IAP 471. Agus / Praktisi IAP 472. Agus / Praktisi IAP 473. Agus / Praktisi IAP 474. Agus / Praktisi IAP 475. Agus / Praktisi IAP 476. Agus / Praktisi IAP 477. Agus / Praktisi IAP 478. Agus / Praktisi IAP 479. Agus / Praktisi IAP 480. Agus / Praktisi IAP 481. Agus / Praktisi IAP 482. Agus / Praktisi IAP 483. Agus / Praktisi IAP 484. Agus / Praktisi IAP 485. Agus / Praktisi IAP 486. Agus / Praktisi IAP 487. Agus / Praktisi IAP 488. Agus / Praktisi IAP 489. Agus / Praktisi IAP 490. Agus / Praktisi IAP 491. Agus / Praktisi IAP 492. Agus / Praktisi IAP 493. Agus / Praktisi IAP 494. Agus / Praktisi IAP 495. Agus / Praktisi IAP 496. Agus / Praktisi IAP 497. Agus / Praktisi IAP 498. Agus / Praktisi IAP 499. Agus / Praktisi IAP 500. Agus / Praktisi IAP 501. Agus / Praktisi IAP 502. Agus / Praktisi IAP 503. Agus / Praktisi IAP 504. Agus / Praktisi IAP 505. Agus / Praktisi IAP 506. Agus / Praktisi IAP 507. Agus / Praktisi IAP 508. Agus / Praktisi IAP 509. Agus / Praktisi IAP 510. Agus / Praktisi IAP 511. Agus / Praktisi IAP 512. Agus / Praktisi IAP 513. Agus / Praktisi IAP 514. Agus / Praktisi IAP 515. Agus / Praktisi IAP 516. Agus / Praktisi IAP 517. Agus / Praktisi IAP 518. Agus / Praktisi IAP 519. Agus / Praktisi IAP 520. Agus / Praktisi IAP 521. Agus / Praktisi IAP 522. Agus / Praktisi IAP 523. Agus / Praktisi IAP 524. Agus / Praktisi IAP 525. Agus / Praktisi IAP 526. Agus / Praktisi IAP 527. Agus / Praktisi IAP 528. Agus / Praktisi IAP 529. Agus / Praktisi IAP 530. Agus / Praktisi IAP 531. Agus / Praktisi IAP 532. Agus / Praktisi IAP 533. Agus / Praktisi IAP 534. Agus / Praktisi IAP 535. Agus / Praktisi IAP 536. Agus / Praktisi IAP 537. Agus / Praktisi IAP 538. Agus / Praktisi IAP 539. Agus / Praktisi IAP 540. Agus / Praktisi IAP 541. Agus / Praktisi IAP 542. Agus / Praktisi IAP 543. Agus / Praktisi IAP 544. Agus / Praktisi IAP 545. Agus / Praktisi IAP 546. Agus / Praktisi IAP 547. Agus / Praktisi IAP 548. Agus / Praktisi IAP 549. Agus / Praktisi IAP 550. Agus / Praktisi IAP 551. Agus / Praktisi IAP 552. Agus / Praktisi IAP 553. Agus / Praktisi IAP 554. Agus / Praktisi IAP 555. Agus / Praktisi IAP 556. Agus / Praktisi IAP 557. Agus / Praktisi IAP 558. Agus / Praktisi IAP 559. Agus / Praktisi IAP 560. Agus / Praktisi IAP 561. Agus / Praktisi IAP 562. Agus / Praktisi IAP 563. Agus / Praktisi IAP 564. Agus / Praktisi IAP 565. Agus / Praktisi IAP 566. Agus / Praktisi IAP 567. Agus / Praktisi IAP 568. Agus / Praktisi IAP 569. Agus / Praktisi IAP 570. Agus / Praktisi IAP 571. Agus / Praktisi IAP 572. Agus / Praktisi IAP 573. Agus / Praktisi IAP 574. Agus / Praktisi IAP 575. Agus / Praktisi IAP 576. Agus / Praktisi IAP 577. Agus / Praktisi IAP 578. Agus / Praktisi IAP 579. Agus / Praktisi IAP 580. Agus / Praktisi IAP 581. Agus / Praktisi IAP 582. Agus / Praktisi IAP 583. Agus / Praktisi IAP 584. Agus / Praktisi IAP 585. Agus / Praktisi IAP 586. Agus / Praktisi IAP 587. Agus / Praktisi IAP 588. Agus / Praktisi IAP 589. Agus / Praktisi IAP 590. Agus / Praktisi IAP 591. Agus / Praktisi IAP 592. Agus / Praktisi IAP 593. Agus / Praktisi IAP 594. Agus / Praktisi IAP 595. Agus / Praktisi IAP 596. Agus / Praktisi IAP 597. Agus / Praktisi IAP 598. Agus / Praktisi IAP 599. Agus / Praktisi IAP 600. Agus / Praktisi IAP 601. Agus / Praktisi IAP 602. Agus / Praktisi IAP 603. Agus / Praktisi IAP 604. Agus / Praktisi IAP 605. Agus / Praktisi IAP 606. Agus / Praktisi IAP 607. Agus / Praktisi IAP 608. Agus / Praktisi IAP 609. Agus / Praktisi IAP 610. Agus / Praktisi IAP 611. Agus / Praktisi IAP 612. Agus / Praktisi IAP 613. Agus / Praktisi IAP 614. Agus / Praktisi IAP 615. Agus / Praktisi IAP 616. Agus / Praktisi IAP 617. Agus / Praktisi IAP 618. Agus / Praktisi IAP 619. Agus / Praktisi IAP 620. Agus / Praktisi IAP 621. Agus / Praktisi IAP 622. Agus / Praktisi IAP 623. Agus / Praktisi IAP 624. Agus / Praktisi IAP 625. Agus / Praktisi IAP 626. Agus / Praktisi IAP 627. Agus / Praktisi IAP 628. Agus / Praktisi IAP 629. Agus / Praktisi IAP 630. Agus / Praktisi IAP 631. Agus / Praktisi IAP 632. Agus / Praktisi IAP 633. Agus / Praktisi IAP 634. Agus / Praktisi IAP 635. Agus / Praktisi IAP 636. Agus / Praktisi IAP 637. Agus / Praktisi IAP 638. Agus / Praktisi IAP 639. Agus / Praktisi IAP 640. Agus / Praktisi IAP 641. Agus / Praktisi IAP 642. Agus / Praktisi IAP 643. Agus / Praktisi IAP 644. Agus / Praktisi IAP 645. Agus / Praktisi IAP 646. Agus / Praktisi IAP 647. Agus / Praktisi IAP 648. Agus / Praktisi IAP 649. Agus / Praktisi IAP 650. Agus / Praktisi IAP 651. Agus / Praktisi IAP 652. Agus / Praktisi IAP 653. Agus / Praktisi IAP 654. Agus / Praktisi IAP 655. Agus / Praktisi IAP 656. Agus / Praktisi IAP 657. Agus / Praktisi IAP 658. Agus / Praktisi IAP 659. Agus / Praktisi IAP 660. Agus / Praktisi IAP 661. Agus / Praktisi IAP 662. Agus / Praktisi IAP 663. Agus / Praktisi IAP 664. Agus / Praktisi IAP 665. Agus / Praktisi IAP 666. Agus / Praktisi IAP 667. Agus / Praktisi IAP 668. Agus / Praktisi IAP 669. Agus / Praktisi IAP 670. Agus / Praktisi IAP 671. Agus / Praktisi IAP 672. Agus / Praktisi IAP 673. Agus / Praktisi IAP 674. Agus / Praktisi IAP 675. Agus / Praktisi IAP 676. Agus / Praktisi IAP 677. Agus / Praktisi IAP 678. Agus / Praktisi IAP 679. Agus / Praktisi IAP 680. Agus / Praktisi IAP 681. Agus / Praktisi IAP 682. Agus / Praktisi IAP 683. Agus / Praktisi IAP 684. Agus / Praktisi IAP 685. Agus / Praktisi IAP 686. Agus / Praktisi IAP 687. Agus / Praktisi IAP 688. Agus / Praktisi IAP 689. Agus / Praktisi IAP 690. Agus / Praktisi IAP 691. Agus / Praktisi IAP 692. Agus / Praktisi IAP 693. Agus / Praktisi IAP 694. Agus / Praktisi IAP 695. Agus / Praktisi IAP 696. Agus / Praktisi IAP 697. Agus / Praktisi IAP 698. Agus / Praktisi IAP 699. Agus / Praktisi IAP 700. Agus / Praktisi IAP 701. Agus / Praktisi IAP 702. Agus / Praktisi IAP 703. Agus / Praktisi IAP 704. Agus / Praktisi IAP 705. Agus / Praktisi IAP 706. Agus / Praktisi IAP 707. Agus / Praktisi IAP 708. Agus / Praktisi IAP 709. Agus / Praktisi IAP 710. Agus / Praktisi IAP 711. Agus / Praktisi IAP 712. Agus / Praktisi IAP 713. Agus / Praktisi IAP 714. Agus / Praktisi IAP 715. Agus / Praktisi IAP 716. Agus / Praktisi IAP 717. Agus / Praktisi IAP 718. Agus / Praktisi IAP 719. Agus / Praktisi IAP 720. Agus / Praktisi IAP 721. Agus / Praktisi IAP 722. Agus / Praktisi IAP 723. Agus / Praktisi IAP 724. Agus / Praktisi IAP 725. Agus / Praktisi IAP 726. Agus / Praktisi IAP 727. Agus / Praktisi IAP 728. Agus / Praktisi IAP 729. Agus / Praktisi IAP 730. Agus / Praktisi IAP 731. Agus / Praktisi IAP 732. Agus / Praktisi IAP 733. Agus / Praktisi IAP 734. Agus / Praktisi IAP 735. Agus / Praktisi IAP 736. Agus / Praktisi IAP 737. Agus / Praktisi IAP 738. Agus / Praktisi IAP 739. Agus / Praktisi IAP 740. Agus / Praktisi IAP 741. Agus / Praktisi IAP 742. Agus / Praktisi IAP 743. Agus / Praktisi IAP 744. Agus / Praktisi IAP 745. Agus / Praktisi IAP 746. Agus / Praktisi IAP 747. Agus / Praktisi IAP 748. Agus / Praktisi IAP 749. Agus / Praktisi IAP 750. Agus / Praktisi IAP 751. Agus / Praktisi IAP 752. Agus / Praktisi IAP 753. Agus / Praktisi IAP 754. Agus / Praktisi IAP 755. Agus / Praktisi IAP 756. Agus / Praktisi IAP 757. Agus / Praktisi IAP 758. Agus / Praktisi IAP 759. Agus / Praktisi IAP 760. Agus / Praktisi IAP 761. Agus / Praktisi IAP 762. Agus / Praktisi IAP 763. Agus / Praktisi IAP 764. Agus / Praktisi IAP 765. Agus / Praktisi IAP 766. Agus / Praktisi IAP 767. Agus / Praktisi IAP 768. Agus / Praktisi IAP 769. Agus / Praktisi IAP 770. Agus / Praktisi IAP 771. Agus / Praktisi IAP 772. Agus / Praktisi IAP 773. Agus / Praktisi IAP 774. Agus / Praktisi IAP 775. Agus / Praktisi IAP 776. Agus / Praktisi IAP 777. Agus / Praktisi IAP 778. Agus / Praktisi IAP 779. Agus / Praktisi IAP 780. Agus / Praktisi IAP 781. Agus / Praktisi IAP 782. Agus / Praktisi IAP 783. Agus / Praktisi IAP 784. Agus / Praktisi IAP 785. Agus / Praktisi IAP 786. Agus / Praktisi IAP 787. Agus / Praktisi IAP 788. Agus / Praktisi IAP 789. Agus / Praktisi IAP 790. Agus / Praktisi IAP 791. Agus / Praktisi IAP 792. Agus / Praktisi IAP 793. Agus / Praktisi IAP 794. Agus / Praktisi IAP 795. Agus / Praktisi IAP 796. Agus / Praktisi IAP 797. Agus / Praktisi IAP 798. Agus / Praktisi IAP 799. Agus / Praktisi IAP 800. Agus / Praktisi IAP 801. Agus / Praktisi IAP 802. Agus / Praktisi IAP 803. Agus / Praktisi IAP 804. Agus / Praktisi IAP 805. Agus / Praktisi IAP 806. Agus / Praktisi IAP 807. Agus / Praktisi IAP 808. Agus / Praktisi IAP 809. Agus / Praktisi IAP 810. Agus / Praktisi IAP 811. Agus / Praktisi IAP 812. Agus / Praktisi IAP 813. Agus / Praktisi IAP 814. Agus / Praktisi IAP 815. Agus / Praktisi IAP 816. Agus / Praktisi IAP 817. Agus / Praktisi IAP 818. Agus / Praktisi IAP 819. Agus / Praktisi IAP 820. Agus / Praktisi IAP 821. Agus / Praktisi IAP 822. Agus / Praktisi IAP 823. Agus / Praktisi IAP 824. Agus / Praktisi IAP 825. Agus / Praktisi IAP 826. Agus / Praktisi IAP 827. Agus / Praktisi IAP 828. Agus / Praktisi IAP 829. Agus / Praktisi IAP 830. Agus / Praktisi IAP 831. Agus / Praktisi IAP 832. Agus / Praktisi IAP 833. Agus / Praktisi IAP 834. Agus / Praktisi IAP 835. Agus / Praktisi IAP 836. Agus / Praktisi IAP 837. Agus / Praktisi IAP 838. Agus / Praktisi IAP 839. Agus / Praktisi IAP 840. Agus / Praktisi IAP 841. Agus / Praktisi IAP 842. Agus / Praktisi IAP 843. Agus / Praktisi IAP 844. Agus / Praktisi IAP 845. Agus / Praktisi IAP 846. Agus / Praktisi IAP 847. Agus / Praktisi IAP 848. Agus / Praktisi IAP 849. Agus / Praktisi IAP 850. Agus / Praktisi IAP 851. Agus / Praktisi IAP 852. Agus / Praktisi IAP 853. Agus / Praktisi IAP 854. Agus / Praktisi IAP 855. Agus / Praktisi IAP 856. Agus / Praktisi IAP 857. Agus / Praktisi IAP 858. Agus / Praktisi IAP 859. Agus / Praktisi IAP 860. Agus / Praktisi IAP 861. Agus / Praktisi IAP 862. Agus / Praktisi IAP 863. Agus / Praktisi IAP 864. Agus / Praktisi IAP 865. Agus / Praktisi IAP 866. Agus / Praktisi IAP 867. Agus / Praktisi IAP 868. Agus / Praktisi IAP 869. Agus / Praktisi IAP 870. Agus / Praktisi IAP 871. Agus / Praktisi IAP 872. Agus / Praktisi IAP 873. Agus / Praktisi IAP 874. Agus / Praktisi IAP 875. Agus / Praktisi IAP 876. Agus / Praktisi IAP 877. Agus / Praktisi IAP 878. Agus / Praktisi IAP 879. Agus / Praktisi IAP 880. Agus / Praktisi IAP 881. Agus / Praktisi IAP 882. Agus / Praktisi IAP 883. Agus / Praktisi IAP 884. Agus / Praktisi IAP 885. Agus / Praktisi IAP 886. Agus / Praktisi IAP 887. Agus / Praktisi IAP 888. Agus / Praktisi IAP 889. Agus / Praktisi IAP 890. Agus / Praktisi IAP 891. Agus / Praktisi IAP 892. Agus / Praktisi IAP 893. Agus / Praktisi IAP 894. Agus / Praktisi IAP 895. Agus / Praktisi IAP 896. Agus / Praktisi IAP 897. Agus / Praktisi IAP 898. Agus / Praktisi IAP 899. Agus / Praktisi IAP 900. Agus / Praktisi IAP 901. Agus / Praktisi IAP 902. Agus / Praktisi IAP 903. Agus / Prakt

Komisi D DPRD Sidoarjo Tampung Usulan Kenaikan UMK

Sidoarjo – HARIAN BANGSA
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo menampung usulan yang disampaikan oleh ratusan massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sidoarjo terkait kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 10 persen.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori di Sidoarjo, Rabu, menyatakan apresiasi terhadap aspirasi setiap elemen masyarakat termasuk para buruh yang menggelar aksi unjuk rasa tersebut. "Kami apresiasi hal tersebut yang mana merupakan hak setiap elemen warga masyarakat," ucap Dhamroni.

Dhamroni menyampaikan ada regulasi yang menjadi dasar penetapan upah minimum di suatu daerah yang mencakup banyak pemangku kepentingan, terutama dari pihak buruh dan perusahaan yang terlibat.

Maka dari itu pihaknya menjelaskan bahwa DPRD Sidoarjo akan mengusulkan kepada pemerintah terkait aspirasi kaum buruh tersebut sebagai bentuk perwakilan masyarakat daerah Sidoarjo khususnya kaum buruh. "Keputusan akhir tetap ada di tangan Gubernur, kami hanya bisa membantu dengan menyampaikan usulan kepada pemerintah," jelas Dhamroni.

Sementara itu massa yang



Massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sidoarjo bergerak menuju Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Rabu (13/11/2024).

turun ke jalan meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memperhatikan kesejahteraan buruh yang menjadi tulang-pung

gung perekonomian Sidoarjo. "Kami sudah meminta Disnaker Sidoarjo untuk memerintahkan Dewan Pengupahan un-

tuk segera membahas kenaikan upah pekerja Sidoarjo," ujar koordinator aksi Suyatno.

Suyatno menerangkan bahwa tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 10 persen merupakan hal yang wajar menilai pertumbuhan ekonomi Sidoarjo sebesar 6,6 persen banyak disokong oleh industri yang mempekerjakan kaum buruh.

Pihaknya menjelaskan selama empat tahun terakhir kenaikan UMK di Sidoarjo hanya naik 3 persen atau sebesar Rp 40.000 yang dinilai tidak paralel dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi yang menyentuh angka 6,13 persen dari tahun 2023 lalu. (ant/rus)

HARIAN
BANGSA

Koran Minggu, Jember

KPPBC TMP B Sidoarjo Musnahkan Rokok Ilegal

Sidoarjo – HARIAN BANGSA
Upaya memberantas peredaran rokok ilegal, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo (KPPBC TMP B Sidoarjo) memusnahkan barang kena cukai ilegal, hasil penindakan periode Juni hingga September 2024. Kegiatan ini berlangsung di PT Hijau Alam Nusantara (HAN), Mojokerto, Selasa (12/11/2024).

Sebanyak 5.973.164 batang rokok ilegal dengan total Rp8,255.236.920 dimusnahkan melalui proses pembakaran. Aksi tegas ini dilakukan untuk memastikan barang-barang tersebut tidak kembali beredar di pasaran dan merugikan negara.

Selama periode tersebut, Bea Cukai Sidoarjo telah melakukan penindakan di berbagai wilayah, termasuk Sidoarjo, Surabaya, dan Mojokerto. Modus pelanggaran

yang ditemukan pun beragam. Mulai dari penggunaan pita cukai bekas, palsu, hingga penyalahgunaan pita cukai untuk jenis rokok yang berbeda.

Kepala Kantor Bea Cukai setempat, Rudy Hery Kurniawan mengatakan peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga menciptakan persaingan yang tidak sehat bagi industri rokok resmi.

"Diperkirakan, negara mengalami kerugian mencapai Rp4,439.037.624 akibat peredaran rokok ilegal ini," kata Rudy.

Rudy menegaskan, pemusnahan ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk produk ilegal serta mengopti-



Pemusnahan rokok ilegal di PT Hijau Alam Nusantara, Mojokerto.

malkan penerimaan negara.

"Pemusnahan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk barang kena cukai ilegal serta mengoptimalkan penerimaan negara di bidang cukai," tegas Rudy.

Rudy mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas peredaran rokok ilegal dengan melaporkan setiap informasi terkait. "Langkah ini diharapkan dapat menciptakan tata-tatanan perdagangan yang adil dan berkelanjutan," harapnya

Dalam proses pemusnahan sendiri, dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Metode pembakaran yang diterapkan di PT Hijau Alam Nusantara dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap kualitas udara. (cat/rus)

HARIAN
BANGSA

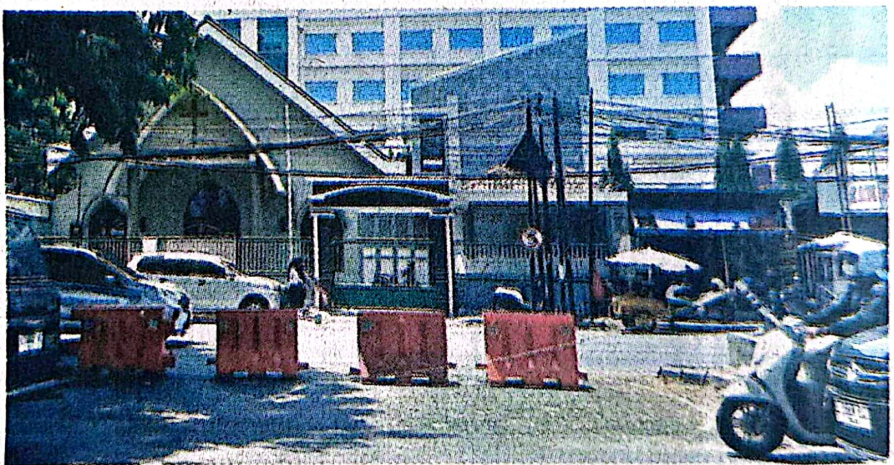
Koran Minggu, Jember

U-Turn Jalan S. Parman Pakai Skema Buka Tutup

SIDOARJO – Setelah melalui tahap uji coba, Satlantas Polresta Sidoarjo memutuskan untuk tidak memermanenkan penutupan jalur putar balik (*U-turn*) di jalur utama Sidoarjo-Surabaya, tepatnya di Jalan Letjen S. Parman.

Sebagai gantinya, jalur putar balik itu diberlakukan sistem buka tutup, di mana penutupan *U-turn* dilakukan pada jam-jam tertentu untuk meminimalkan kemacetan di ruas jalan tersebut.

"Jadi, diterapkan sistem buka tutup untuk *U-turn* di Jalan Letjen S. Parman, ada jam-jamnya. Pada pagi dan sore hari," kata Kanit-



AHMAD REZA/JAWA POS

SITUASIONAL: Papan pembatas terpasang di U-turn Jalan Letjen S. Parman. Penutupan itu diputuskan tidak permanen.

turjawali Satlantas Polresta Sidoarjo AKP Jauhar.

Pada pagi hari, penutupan putar balik itu akan dilakukan pada pukul 06.00 hingga 08.00. Sedangkan pada sore hari, penutupan dilakukan pukul 16.00 hingga 18.00.

"Sama-sama ditutup dua jam saja," katanya.

Meski begitu, Jauhar mengatakan bahwa jadwal penutupan tersebut tidak tetap. Petugas patroli bisa menutup *U-turn* sewaktu-waktu. (eza/ris)



FIRMA ZUHDI/JAWA POS

MASIH PROSES: Dua ornamen berdiri di area taman pasif di kawasan bundaran exit toll Sidoarjo.

Udeng Pacul Gowang Hiasi Wajah Exit Toll

SIDOARJO - Wajah gerbang masuk wilayah Kota Sidoarjo tengah dipoles. Salah satunya di taman pasif di kawasan bundaran *exit toll* Sidoarjo. Selain ditata ulang, sejumlah ornamen baru juga dibangun.

Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Hery Santoso mengatakan, penataan kali ini merupakan lanjutan dari program

sebelumnya. "Tahun lalu, taman pasif pulau jalan di Jalan Pahlawan *exit toll* sudah dibenahi," katanya.

Sedangkan untuk tahun ini, yang dibenahi DLHK adalah pulau jalan di sisi barat. Area tersebut diperbaiki karena menjadi salah satu pintu masuk Sidoarjo. "Seluruh orang yang masuk Sidoarjo dari *exit toll* bisa langsung melihat area taman pasif tersebut," kata Hery.

Selain menambah tanaman di area taman, DLHK membangun sejumlah ornamen. Di antaranya, udeng pacul gowang khas Sidoarjo yang terletak di dekat jalan raya.

Hery mengatakan, saat ini pelaksana proyek tengah menuntaskan pembangunan taman pasif tersebut. "Hasil akhirnya masih belum kelihatan. Akhir Desember nanti selesai dan baru bisa disaksikan," pungkasnya. **(uzi/ris)**

Jawa Pos

Belum Semua Pelaku Usaha Memahami Regulasi Perizinan

SIDOARJO - Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten penyumbang investasi terbesar di Jawa Timur. Meski demikian, masih ada PR terkait kemudahan layanan perizinan bagi para pelaku usaha yang ingin berinvestasi di kabupaten ini.

Salah satu yang cukup krusial adalah masalah sosialisasi program kepada para pengusaha. Selain itu, yang juga diperlukan adalah keberadaan petugas khusus yang bisa menjadi pemandu proses perizinan.

Hal itu berdasarkan hasil forum konsultasi publik bagi pelaku usaha yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sidoarjo bersama *stakeholder*.

Forum itu jadi ajang pemetaan terkait kendala pelaku usaha terkait proses perizinan. "Perlu lebih banyak sosialisasi, terutama terkait tata cara pembuatan izin secara *online*," kata Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Kayan.

Menurutnya, saat ini masih ada



keluhan terkait hal ini. Tak sedikit para pengusaha yang kesulitan. Sebab, regulasi perizinan memang kompleks. "Selain itu, perlu *contact person* sendiri agar pemohon izin tidak bingung," katanya.

Sebagai solusi, Pemkab perlu menambah akses informasi terkait tata cara pengurusan izin. "Sehingga semakin meminimalkan kurangnya

pemahaman dan informasi tentang perizinan," katanya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Sidoarjo Rudi Setiawan mengatakan pihaknya terus memberikan layanan yang memudahkan. Di antaranya melalui *class meeting* atau grup khusus lewat aplikasi percakapan bersama pelaku usaha. "Secara *offline*, kami juga menyiapkan pelayanan kemudahan berusaha yang berisi 10 perangkat daerah teknis," katanya.

Rudi optimistis layanan-layanan ini bakal makin memudahkan para pengusaha. Karena itu pula, DPMPTSP optimistis untuk tahun ini target realisasi investasi Rp 12 triliun bisa tercapai.

"Yang kita lakukan, secara *offline* kita menyiapkan SDM pelayanan kemudahan berusaha yang berisi 10 perangkat daerah teknis," katanya. Secara *online*, pihaknya menyiapkan sistemnya dengan mengintegrasikan di aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU). (*uzi/ris*)

Jawa Pos

Pembahasan UMK, Pemkab Tunggu Regulasi Pusat

Pekerja Usul Kenaikan 10 Persen, Pengusaha Berpatokan Aturan

SIDOARJO - Di saat sejumlah daerah sudah mulai membahas usulan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2025, tidak demikian dengan Sidoarjo. Hingga kini, pemkab masih belum berani memulai proses tersebut.

Penyebabnya, pemkab bersama unsur-unsur dewan pengupahan (DP) masih menunggu peraturan dan petunjuk teknis penyusunan UMK tahun depan dari pemerintah pusat.

"Peraturan pemerintah (PP) terkait formula penyusunan UMK yang baru belum ada. Di sisi lain, PP itu yang akan jadi cantolan penyusunan. Karena itu, pembahasan (usulan UMK) masih menunggu PP yang baru," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo Ainun Amalia kemarin.

Hal yang sama disampaikan Ketua Asosiasi Pe-



Peraturan Pemerintah terkait formula penyusunan UMK yang baru belum ada. Di sisi lain, PP itu yang akan jadi cantolan penyusunan. Karena itu, pembahasan (usulan UMK) masih menunggu PP yang baru."

AINUN AMALIA

Kepala Disnaker Sidoarjo
ngusaha Indonesia (Apindo) Sidoarjo Sukiyanto. Dia menyebutkan, cantolan hukum untuk pembahasan UMK harus jelas. "Kalau tahun lalu *kan* pakai PP 51 Tahun 2023, untuk pembahasan UMK tahun depan cantolannya harus jelas dulu, setelah itu baru kita bahas," katanya.

Dia menambahkan, terkait besaran kenaikan UMK, para pengusaha di Sidoarjo tidak memiliki keinginan khusus. "Pengusaha tidak kepingin nominal ini dan itu. Semua

dikembalikan ke aturan. Berapa pun nominalnya asal sesuai peraturan dan ketentuan," jelasnya.

Lantas, bagaimana dengan sikap para pekerja? Ketua Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Sidoarjo Ahmad Yani mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan rapat koordinasi. "Setelah ini, kami segera menyusun rekomendasi usulan yang akan disampaikan terkait UMK 2025," katanya.

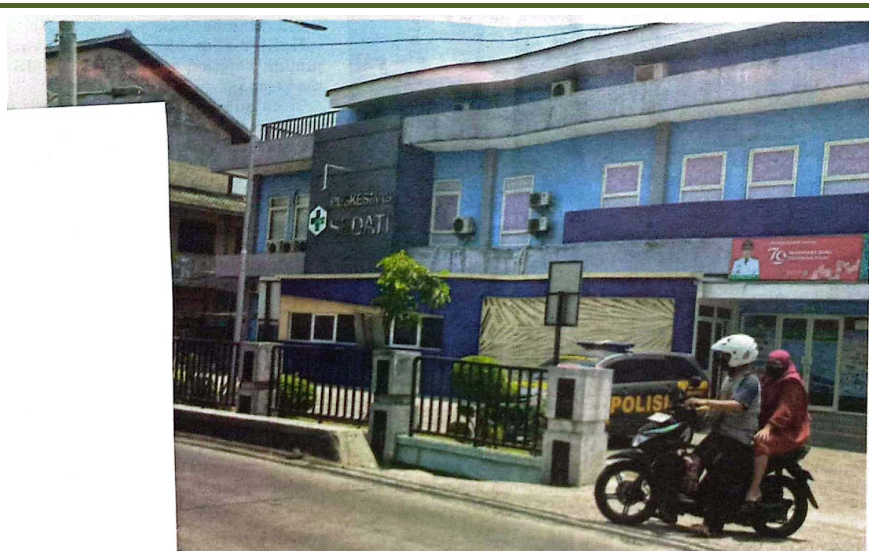
Meski belum final, Yani menyebutkan bahwa dasar perhitungan kenaikan UMK oleh kalangan pekerja mengacu pada angka kebutuhan hidup layak (KHL). "Proyeksinya ingin naik sekitar 10 persen," kata Yani.

Tahun ini, besaran UMK di Sidoarjo ditetapkan sebesar Rp 4,638 juta. Atau naik sekitar Rp 120 ribu dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp 4,518 juta. Angka tersebut menjadikan UMK kabupaten ini menjadi tertinggi ketiga di Jawa Timur. (**uzi/ris**)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



FASILITAS: Salah satu Puskesmas yang ada di Kecamatan Sedati

Tahun Depan, Dinkes Tak Tambah Jumlah Dokter Puskesmas

KOTA-Pemkab Sidoarjo masih belum berencana untuk menambah jumlah dokter di Puskesmas. Namun, layanan kesehatan dipastikan tetap optimal seiring meski ada pertumbuhan jumlah peserta BPJS Kesehatan.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo, Danang Abdul Ghani mengatakan, jumlah dokter di Puskesmas memang perlu ditambahkan. Hal tersebut jika ada peningkatan jumlah kapitasi atau peserta BPJS di Puskesmas. "Jika ada penambahan

kapitasi (di Puskesmas red) maka perlu penambahan jumlah dokter untuk memenuhi rasio kapitasinya," ucapnya kepada Radar Sidoarjo, Rabu (13/11).

Penemuan rasio tersebut, demi menjaga kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas.

"Menurut aturan yang ada, rasio ideal dokter di Puskesmas adalah satu dokter untuk setiap 5.000 peserta BPJS," jelasnya.

Dengan rasio tersebut, tenaga medis di Puskesmas dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

● Ke Halaman 10



KEMENDIKDASMEN

Pemerintah Perlu Belanja Masalah

Terkait Permintaan Organisasi Guru soal Zonasi

JAKARTA - Sejumlah organisasi guru sepakat PPDB jalur zonasi dilanjutkan. Namun, dengan beberapa catatan. Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur memandang sistem zonasi sejatinya baik. Apalagi, ketika kembali pada aturan awal sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Tapi sayangnya, dalam tujuh tahun

penerapannya, zonasi malah tidak dapat mencapai tujuan awalnya. Hal ini lantaran sistem zonasi tidak dilaksanakan dengan benar di tingkat paling bawah. Sebagai contoh, kuota zonasi untuk SD minimal 70 persen dari daya tampung. Lalu, SMP dan SMA minimal 50 persen dari daya tampung. Dengan ketentuan ini maka harusnya sekolah SD wajib menampung minimal 70 persen atau lebih atau sampai maksimal 100 persen dari jalur zonasi. "Yang artinya, apabila ada siswa

kuota barulah, sekolah dapat menerima jalur prestasi maupun perpindahan orang tua," jelasnya saat dihubungi Jawa Pos, kemarin (13/11).

Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Sekolah yang notabene dipengaruhi oleh oknum tertentu justru lebih mengutamakan atau mendahulukan jalur prestasi dan perpindahan orang tua. Hal ini tentu saja mengurangi kuota zonasi. Sehingga kerap muncul kasus dimana siswa yang berada lebih dekat dari sekolah

malah tidak mendapatkan kuota lagi. "Jika demikian, alih-alih untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan akses pun tidak akan tercapai," keluhnya.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriawan Salim memiliki pandangan yang sama. Sebaran sekolah dan tidak meratanya keberadaan guru di sekolah juga tidak mendukung program zonasi. Kondisi ini yang kemudian memaksa orang tua mengambil jalan pintas dengan

memanipulasi kartu keluarga karena pindah domisili.

Terkait hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, bahwa pihaknya masih belum memutuskan. Kemendikdasmen masih akan belanja masalah dan meminta pertimbangan dari sejumlah pakar terkait hal ini.

Kendati begitu, dia menargetkan format regulasi baru sistem zonasi PPDB diusahakan rampung pada Februari mendatang. (mia/bas)



TUNGGU KAJIAN: Abdul Mu'ti.

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tingkatkan Efektivitas dan Capaian

Pemkab Evaluasi Smart City, Sekda Minta Kolaborasi Hexahelix

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar evaluasi implementasi program kota cerdas (Smart City) Tahap 2 Tahun 2024. Penilaian kedua ini terkait pengembangan program Smart City sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan capaian di Kabupaten Sidoarjo. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Sidoarjo.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Abridawati mengatakan bahwa dalam pengembangan Smart City dari tahun ke tahun dibutuhkan kolaborasi Hexahelix yang melibatkan enam unsur diantaranya pemerintah, industri, perguruan tinggi, masyarakat, swasta, hingga media massa untuk mendukung pencapaian tujuan Smart City.

"Sinergi yang solid akan mempercepat implementasi layanan publik yang lebih efektif, transparan, dan inovatif," katanya saat mem-



Evaluasi implementasi program kota cerdas (Smart City) Tahap 2 Tahun 2024

buka acara Evaluasi Implementasi Program Kota Cerdas (Smart City) Tahap 2 Tahun 2024 di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo, Selasa sore, (12/11/24).

Fenny juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi

yang canggih dan terintegrasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengantisipasi tantangan perkembangan digital di masa depan.

"Ada sebanyak 75 persen program smart city yang sudah ber-

jalan, yaitu 17 program prioritas Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, Noer Rochmawati

berharap evaluasi yang dilakukan dapat menjadi panduan bagi OPD dalam menyesuaikan strategi dan program kerja terkait Smart City.

"Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan semua sektor bekerja sesuai dengan visi dan misi Smart City, yaitu menciptakan Sidoarjo sebagai kota cerdas yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan," tuturnya Rabu (13/11/24)

"Kami juga berharap dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan peningkatan, sehingga setiap OPD dapat terus meningkatkan kinerja pelayanan publik berbasis digital yang menjawab kebutuhan masyarakat," tambahnya.

Dalam penilaian tersebut, menghadirkan asesor dari berbagai akademisi dan pemerintah pusat diantaranya,

1. Hafni Septiana : Praktisi IKTI
2. Aman Kurniawan : Kemenpan RB
3. Agus Tri Cahyono : Praktisi LAP
4. Dyah Mutiarin : Akademisi UMY
5. Wikan Danar Sunindyo : Akademisi ITB. ● Loec

Jawa Pos

Sidoarjo, Memorandum

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar evaluasi implementasi program kota cerdas (Smart City) Tahap II. Penilaian kedua ini terkait pengembangan program itu sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan capaian di Kabupaten Sidoarjo. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Sekdakab Sidoarjo Fenny Abridawati mengatakan, dalam pengembangan smart city dari tahun ke tahun dibutuhkan kolaborasi hexahelix yang melibatkan enam unsur. Di antaranya pemerintah, industri, perguruan tinggi, masyarakat, swasta, hingga media massa untuk

mendukung pencapaian tujuan.

"Sinergi yang solid akan mempercepat implementasi layanan publik yang lebih efektif, transparan, dan inovatif," katanya saat membuka acara yang digelar di Opsroom Setdakabupaten Sidoarjo, Selasa (12/11).

Fenny juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi yang canggih dan terintegrasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengantisipasi tantangan perkembangan digital di masa depan. "Ada sebanyak 75 persen program smart city yang sudah berjalan, yaitu 17 program prioritas bupati yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026," jelasnya.

Kepala Dinas Kominfo Noer Rochmawati berharap, evaluasi yang dilakukan dapat menjadi panduan bagi OPD dalam menyesuaikan strategi

dan program kerja terkait smart city.

"Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan semua sektor bekerja sesuai dengan visi dan misi smart city, yaitu menciptakan Sidoarjo sebagai kota cerdas yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan," tuturnya. "Kami juga berharap dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan peningkatan, sehingga setiap OPD dapat terus meningkatkan kinerja pelayanan publik berbasis digital yang menjawab kebutuhan masyarakat," tambahnya. (lud/jok/epe)



Rapat evaluasi implementasi program smart city kedua di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo.

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KILAS BIROKRASI

Bappenas Catat Angka Kemiskinan di Sidoarjo 4.53 Persen

Sidoarjo, Bhirawa

Angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 ini sebesar 4.53%. Pihak Bappenas RI menyarankan supaya perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo terus bergerak bersama sama dalam menurunkan jumlah kemiskinan.

Fungsional Perencanaan Madya Bappenas RI, Widaryatno, mengatakan di Kabupaten Sidoarjo jangan sampai ada anak yang tidak sekolah. Kemudian, jangan sampai ada warga yang tidak mempunyai penghasilan.

Dalam acara Rakor penanggulangan Kemiskinan tahun 2024, yang digelar oleh Bappeda Sidoarjo, Rabu (13/11) kemarin itu, Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Jatim, Didin Wahidin, mengharapkan tren penurunan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo tiap tahun supaya terus dipertahankan.

“Penurunan kemiskinan, supaya terus dilakukan sampai dengan tahun 2045, pada waktu era Indonesia emas,” kata Didin, yang menjadi salah satu Narasumber yang dihadirkan oleh Bappeda Sidoarjo.

Didin mengatakan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 sebesar 9.79%. Pada tahun Indonesia emas di tahun 2045 nanti, tiap tahun ditargetkan harus bisa menurun sebesar 0.25%.

Tentang kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, di daerah padat penduduk juga masih ditemui warga miskin dan menjadi pengangguran. Seperti di Kecamatan Waru, Taman dan Sidoarjo. “ini harus menjadi analisa,” katanya, dalam acara yang digelar di ruang rapat delta graha Setda Sidoarjo itu.

Kemudian, dirinya menyampaikan analisa, di wilayah padat penduduk di Kabupaten Sidoarjo, seperti Kecamatan Taman, Waru dan Sidoarjo, masih banyak ditemukan rumah yang tidak

layak huni. kus.wwn